



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien, dan terpadu serta guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu adanya perencanaan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan guna optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6350);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 385);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 23);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



5. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan program Perangkat Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.
7. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi kegiatan, sasaran, fokus, dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada APIP dalam melaksanakan Perencanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Daerah;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pengawasan oleh APIP.



BAB III PERENCANAAN PENGAWASAN

Pasal 4

Perencanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi perencanaan terhadap:

- a. kegiatan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sasaran yakni Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, sekolah, Unit Kerja, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. fokus berupa penjaminan mutu (*quality assurance*), konsultasi (*consulting*), dan kegiatan pencegahan korupsi (*anti corruption activities*); dan
- d. jadwal pelaksanaan berupa penentuan tahapan pengawasan dilaksanakan dalam periode bulan Januari sampai dengan Desember 2021.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun melalui koordinasi antara Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Penyusunan Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan skala prioritas dan risiko.

Pasal 6

APIP dalam melakukan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan :

- a. perencanaan kegiatan, sasaran, dan fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. jadwal pelaksanaan perencanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan uraian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

APIP dalam melakukan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 Januari 2021

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 3



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS

URAIAN KEGIATAN, SASARAN, DAN
FOKUS PERENCANAAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan terselenggaranya pemerintahan yang bersih (*clean government*), APIP dituntut untuk dapat melaksanakan pengawasan secara efektif. Selain itu APIP harus inovatif, merubah mindset ke arah kegiatan pemberian saran (*advisory activities*), menyusun Program Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR), dan memiliki kompetensi untuk melakukan audit kinerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat memiliki peran antara lain:

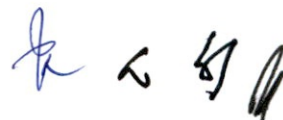
1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan/ekonomis, efesiensi, efektifitas, dan persamaan (*equality*) dalam pencapaian tujuan instansi pemerintah;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan implementasi manajemen risiko instansi pemerintah; dan
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Untuk mewujudkan peningkatan kinerja pengelolaan pemerintahan di pemerintah Daerah dan Pemerintah desa, serta untuk mewujudkan peningkatan hasil guna dan daya guna pelaksanaan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa perlu dilakukan pengawasan.

II. TUJUAN

Inspektorat menyusun Perencanaan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2021 dengan tujuan sebagai berikut :

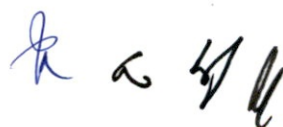
1. memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan pada tahun 2021;
2. meningkatkan akuntabilitas publik instansi Pemerintah Daerah;
3. menetapkan prioritas pengawasan yang bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
4. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat kepada APIP.



III. KEGIATAN PENGAWASAN

Perencanaan Kegiatan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. pelaksanaan pengawasan internal berbasis risiko;
2. pengusutan atas kebenaran laporan pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan konsultasi (*consulting*) terhadap pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dan Kepala Desa (*kas opname* desa dan *stock opname* barang persediaan perangkat daerah);
4. melakukan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atas seluruh Perangkat Daerah;
5. melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah;
6. melakukan reviu atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus;
7. melakukan reviu atas Standar Harga;
8. melakukan reviu atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
9. melakukan reviu atas penyerapan anggaran, pengadaan barang/jasa dan dana desa;
10. melakukan reviu atas *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) Perangkat Daerah;
11. melakukan reviu atas Dana Alokasi Khusus (DAK);
12. melakukan reviu atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan (RKPD);
13. melakukan reviu Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Perubahan (KUA PPAS);
14. melakukan reviu atas Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;
15. melakukan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
16. melakukan reviu atas pengelolaan aset/Barang Milik Daerah (BMD);
17. melakukan reviu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
18. melakukan *Monitoring Centre of Prevention* (MCP) dengan koordinator unit koordinasi dan supervise Bidang Pencegahan KPK;
19. melakukan monitoring dan pemutahiran data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal;
20. menyelenggarakan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli);
21. menyelenggarakan Unit Pengendalian Gratifikasi dan penanganan *Whistle Blowing System* (WBS);
22. menyelenggarakan bimbingan teknis sesuai tema/isu strategis dan kebutuhan *audity*;



23. melakukan pendampingan terhadap pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah;
24. melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
25. melakukan pendampingan dan evaluasi atas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Perangkat Daerah;
26. melakukan pendampingan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*;
27. melakukan evaluasi Perencanaan Pembangunan *Responsif Gender* (PPRG);
28. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
29. Melakukan evaluasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

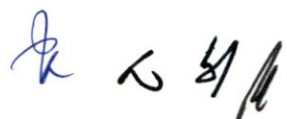
IV. SASARAN PENGAWASAN

Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2021 sasaran perencanaan meliputi program/kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, sekolah, Unit Kerja, dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Sasaran Pengawasan dimaksud ditentukan lebih lanjut dalam Program Kerja Audit.

V. FOKUS PERENCANAAN PENGAWASAN

Fokus perencanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2021 meliputi:

1. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) :
 - a. audit kinerja;
 - b. audit dengan tujuan tertentu;
 - c. revidu; dan
 - d. evaluasi.
2. Konsultasi (*Consulting*) :
 - a. pendampingan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. pendampingan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - c. pendampingan Zona Integritas (ZI); dan
 - d. bimbingan teknis.
3. Kegiatan Anti Korupsi (*Anti Corruption Activities*):
 - a. *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi dengan Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - b. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
 - c. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
 - d. pengaduan masyarakat;



- e. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
 - f. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
4. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, Inspektorat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengawasan terpadu (*joint audit*) dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pusat atau bersama instansi terkait;
 - b. melayani dan membuka klinik konsultasi;
 - c. menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Inspektorat untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat;
 - d. menyelenggarakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - e. menyelenggarakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) guna meningkatkan ilmu dan wawasan dibidang pengawasan;
 - f. monitoring Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
 - g. melakukan pendampingan Perangkat daerah, Pemerintah Desa, sekolah, Unit Kerja, dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan keyakinan pelaksanaan tugas dan fungsinya atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.

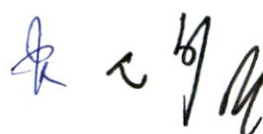
VI. PENUTUP

Demikian Perencanaan Pengawasan Tahun 2021 untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan dan fungsi Inspektorat sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

JADWAL PELAKSANAAN PERENCANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Anggota Tim				HP	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PM	PT	KT	AT						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pengelolaan aset daerah	Reviu	Menilai kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah	pengelolaan aset daerah Th 2020	Mg-I Des 2020	Mg-III Jan 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Rekomendasi MCP
2	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Program Peningkatan Pendapatan Daerah	BPPKAD	Mg-I Feb 2021	Mg-IV Feb 2021	1	1	1	3	6	10.800.000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Permintaan BPKP
3	Aduan Masyarakat/ Permintaan Stakeholders	Audit Tujuan Tertentu	Investigasi/ konfirmasi atas penyimpangan terhadap Peraturan	Tindak Lanjut Dumas/ Permintaan Stakeholders	Mg-I Jan 2021	Mg-IV Des 2021	1	1	1	3	76	91.200.000	9 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	
4	Problem solving	Konsultasi	memberikan solusi atas permasalahan/ risiko	OPD, UPT, Desa	Mg-I Jan 2021	Mg-IV Des 2021	1	1	1	3	6	-	12 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	
5	Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan	Reporting	Melaporkan hasil pengawasan kepada MOS	ILHP 2020 semester II	Mg-II Jan 2021	Mg-IV Jan 2021	1	1	1	3	6	-	1 LHA	Laptop, ATK	Rendah	Renbinwas 2021 Kemendagri
6	SAKIP	Bimtek	Penilaian mandiri SAKIP OPD	Seluruh OPD	Mg-III Jan 2021	Mg-III Jan 2021	1	1	1	3	6	-	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Permintaan Kemen PANRB
7	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Reviu	Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK	DAK TW IV 2020	Mg-III Jan 2021	Mg-III Jan 2021	1	1	1	3	6	7.200.000	5 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Mandatory Kemenkeu
8	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Reviu	Menilai kewajaran HPS	PBJ > 500 jt	Mg-IV Jan 2021	Mg-IV Okt 2021	1	1	1	3	270	40.500.000	50 LHR			
9	Reformasi Birokrasi	Monev	PMRB TW I	Seluruh OPD	Mg-IV Mrt 2021	Mg-IV Mrt 2021	1	1	1	3	6	600.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Permintaan Sekda
10	LHKASN	Verifikasi	Memverifikasi LHKASN	ASN Gol IV dan Eselon III & IV	Mg-I Mrt 2021	Mg-V Mrt 2021	1	1	1	3	6	-	1 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Mandatory Kemen PANRB
11	Saber Pungli	Monitoring, Sosialisasi & Penindakan	Memberantas Pungli	OPD, UPT, Desa	Mg-IV Jan 2021	Mg-IV Des 2021	1	1	1	3	9	452.400.000	12 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
12	WBS & benturan kepentingan	Monitoring & Sosialisasi	Investigasi/ konfirmasi atas penyimpangan terhadap Peraturan	OPD, UPT, Desa	Mg-IV Jan 2021	Mg-IV Des 2021	1	1	1	3	6	-	12 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
13	Pengendalian Gratifikasi	Monitoring & Sosialisasi	sosialisasi dan menindak lanjuti laporan gratifikasi	OPD, UPT, Desa	Mg-IV Jan 2021	Mg-IV Des 2021	1	1	1	3	6	-	12 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri

Handwritten signature/initials

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Anggota Tim				HP	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PM	PT	KT	AT						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Analisis Standar Biaya	Reviu	Menilai kesesuaian poses penyusunan ASB	ASB 2022	Mg-I Feb 2021	Mg-III Feb 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Rekomendasi MCP
15	Harga Satuan Pokok Kegiatan	Reviu	Menilai kesesuaian poses penyusunan HSPK	HSPK 2022	Mg-I Feb 2021	Mg-III Feb 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Rekomendasi MCP
16	Standar Satuan Harga	Reviu	Menilai kewajaran harga dan kesesuaian poses penyusunan SSH	SSH 2022	Mg-I Feb 2021	Mg-III Feb 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Rekomendasi MCP
17	Standar Belanja Umum	Reviu	Menilai kewajaran harga dan kesesuaian poses penyusunan SBU	SBU 2022	Mg-I Feb 2021	Mg-III Feb 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Rekomendasi MCP
18	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Reviu	Memvalidasi data kinerja IKK	LPPD 2020	Mg-I Feb 2021	Mg-III Feb 2021	1	1	1	3	9	10.800.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
19	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Reviu	Menilai kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah	BPPKAD & OPD	Mg-I Feb 2021	Mg-IV Mrt 2021	1	1	1	3	9	21.600.000	10 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Permintaan KDH
20	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Evaluasi	Menilai implementasi SAKIP	34 Perangkat Daerah	Mg-I Feb 2021	Mg-III Apr 2021	1	1	1	3	5	25.500.000	34 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Mandatory Kemen PANRB
21	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Monev	PMPRB TW II	Semua OPD	Mg-III Jun 2021	Mg-III Jun 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
22	Pengadaan Barang Jasa	ATT	Memberikan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan PBJ Fisik	Proyek fisik	Mg I Okt 2021	Mg 1 Des 2021	1	1	1	3	6		6 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Permintaan BPKP
23	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Monev	PMPRB TW III	Semua OPD	Mg-IV Sep 2021	Mg-IV Sep 2021	1	1	1	3	5	3.000.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
24	Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting	Mendampingi dan memantau implementasi Pembangunan ZI	UPT Puskesmas Jekulo	Mg-IV Feb 2021	Mg-IV Feb 2021	1	1	1	3	5	3.000.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
25	Pengadaan Barang Jasa	Probit Audit	memastikan bahwa proses PBJ telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip integritas, kebenaran, dan kejujuran	Proyek fisik	Mg-I Mrt 2021	Mg-III Mei 2021	1	1	1	3	6	10.800.000	10 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Rekomendasi MCP
26	Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Pertanian/ Perkebunan	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian & Pangan	Mg-I Mrt 2021	Mg-IV Mrt 2021	1	1	1	3	6	14.400.000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Permintaan BPKP
27	Program Program perencanaan prasarana wilayah, Ekonomi dan sumber daya alam	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	Bappeda	Mg-I Mrt 2021	Mg-IV Mrt 2021	1	1	1	3	6	14.400.000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Permintaan BPKP
28	Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat TW I	Monitoring	Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Seluruh OPD	Mg-I Mrt 2021	Mg-V Mrt 2021	1	1	1	3	6	14.400.000	4 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
29	Koordinasi Pengawasan	Pendampingan	Memfasilitasi BPK audit keuangan LKPD	Audit Keuangan atas LKPD 2020	Mg-I Apr 2021	Mg-IV Apr 2021	1	1	1	3	6	12.000.000	1 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	

Handwritten signature/initials

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Anggota Tim				HP	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PM	PT	KT	AT						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
30	Pengelolaan Dana Desa	Audit Tujuan Tertentu	Menilai 3E atas Pengelolaan Dana Desa	18 Desa	Mg-I Agt 2021	Mg-III Sep 2021	1	1	1	3	108	64.800.000	18 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	
31	Monitoring Centre of Prevention TW I	Monitoring	Memantau tindak lanjut rekomendasi Korsupgah KPK	Rekomendasi Korsupgah	Mg-IV Mrt 2021	Mg-IV Mrt 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	
32	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Monitoring	Memantau realisasi LHKPN	Eselon II, DPRD, Bupati, Auditor	Mg-IV Mrt 2021	Mg-IV Mrt 2021	1	1	1	3	6	-	1 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Mandatory Kemen PANRB
33	Reformasi Birokrasi	Monev	PMPRB TW IV	Semua OPD	Mg-IV Des 2021	Mg-IV Des 2021	1	1	1	3	6	600.000	1 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	
34	Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting	Mendampingi dan memantau implementasi Pembangunan ZI	DPMTSP	Mg-V Mrt 2021	Mg-V Mrt 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
35	Penerapan manajemen Risiko	Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting	Mendampingi dan memantau implementasi Manajemen Risiko	Bappeda	Mg-V Mrt 2021	Mg-V Mrt 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
36	Program peningkatan dan pengelolaan pasar	Audit Tujuan Tertentu atas Pendapatan	Menilai realisasi Pendapatan Daerah	Dinas Perdagangan	Mg-I Apr 2021	Mg-III Apr 2021	1	1	1	3	6	10.800.000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Rekomendasi MCP
37	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Reviu	Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK TW I 2021	DAK TW I 2021	Mg-I Apr 2021	Mg-III Apr 2021	1	1	1	3	6	10.800.000	5 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Mandatory Kemenkeu
38	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Reviu	Menilai keselarasan RKPD dengan RPJMD dan Renja serta terpadu dengan Manajemen Risiko dan Pengarus Utamaan Gender	Bappeda & Semua OPD	Mg-I Apr 2021	Mg-IV Mei 2021	1	1	1	3	6	28.800.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
39	Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting	Mendampingi dan memantau implementasi Pembangunan ZI	BPPKAD	Mg-IV Apr 2021	Mg-IV Apr 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
40	Program pelayanan penanaman modal	Audit Ketaatan Perizinan	menilai ketaatan terhadap prosedur, tata cara serta peraturan perundang-undangan	PTSP	Mg-I Jun 2021	Mg-III Jun 2021	1	1	1	3	6	7.200.000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Rekomendasi MCP
41	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan)	Reviu	Menilai keselarasan RKPD Perubahan dengan Renja Perubahan	Bappeda & Semua OPD	Mg-I Jun 2021	Mg-III Jun 2021	1	1	1	3	6	7.200.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
42	Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS)	Reviu	Menilai keselarasan KUA PPAS dengan RKPD	Bappeda & Semua OPD	Mg-I Jun 2021	Mg-III Jun 2021	1	1	1	3	6	7.200.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
43	Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat TW II	Monitoring	Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Seluruh OPD	Mg-I Jun 2021	Mg-IV Jun 2021	1	1	1	3	6	14.400.000	4 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	
44	Vaksinasi Covid-19	Audit Tujuan Tertentu	Memastikan pelaksanaan vaksinasi covid-19 tepat sasaran	Dinas Kesehatan	Mg-I Jun 2021	Mg-IV Des 2021	1	1	1	3	6	21.600.000	3 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Instruksi Mendagri
45	Monitoring Centre of Prevention TW II	Monitoring	Memantau tindak lanjut rekomendasi Korsupgah KPK	Rekomendasi Korsupgah	Mg-III Jun 2021	Mg-III Jun 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	

Handwritten signature/initials

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Anggota Tim				HP	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PM	PT	KT	AT						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
46	Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting	Mendampingi dan mengevaluasi implementasi Pembangunan ZI	Disdikpora	Mg-IV Jun 2021	Mg-IV Jun 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
47	Penerapan manajemen Risiko	Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting	Mendampingi dan mengevaluasi implementasi SPIP	BPPKAD	Mg-IV Jun 2021	Mg-IV Jun 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
48	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Reviu	Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK TW II 2021	OPD	Mg-I Jul 2021	Mg-III Jul 2021	1	1	1	3	6	7.200.000	5 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Mandatory Kemenkeu
49	Penanganan Pandemi Covid 19	Reviu	Memverifikasi data Nakes yang mendapat insentif	Insentif Nakes	Mg-I Jul 2021	Mg-III Jul 2021	1	1	1	3	6	7.200.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
50	Pelayanan Publik	Evaluasi	Menilai kualitas pelayanan publik	Dinas Perhubungan	Mg-I Mei 2021	Mg-II Mei 2021	1	1	1	3	6	7.200.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
51	Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (Perubahan KUA PPAS)	Reviu	Menilai keselarasan Perubahan KUA PPAS dengan RKPD Perubahan	Bappeda & Semua OPD	Mg-I Jul 2021	Mg-II Jul 2021	1	1	1	3	6	7.200.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
52	Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting	Mendampingi dan memantau implementasi Pembangunan ZI	RSD dr Loekmonohadi	Mg-III Jul 2021	Mg-III Jul 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
53	Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan	Evaluasi	Menilai kesesuaian output dengan dokumen GBS	Dinsos P3AP2KB	Mg-III Jul 2021	Mg-III Jul 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Mandatory Kemen PPA
54	Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan	Monitoring	Melaporkan hasil pengawasan kepada MOS	ILHP 2021 semester I	Mg-III Jul 2021	Mg-III Jul 2021	1	1	1	3	6	-	1 ILHA	Laptop, ATK	Rendah	Renbinwas 2021 Kemendagri
55	Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting	Mendampingi dan mengevaluasi implementasi Pembangunan ZI	Dinas Perdagangan	Mg-IV Jul 2021	Mg-IV Jul 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
56	Penerapan manajemen Risiko	Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting	Mendampingi dan mengevaluasi implementasi SPIP	BKPP	Mg-IV Jul 2021	Mg-IV Jul 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
57	Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur	Audit Kepegawaian	Menilai kesesuaian pelaksanaan Tusi dengan kebijakan peraturan perundang undangan	BKPP	Mg-I Agt 2021	Mg-III Agt 2021	1	1	1	3	6	10.800.000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Rekomendasi MCP
58	Program pengelolaan aset daerah	Reviu	memastikan keberadaan aset	Aset Tahun 2021	Mg-I Agt 2021	Mg-III Agt 2021	1	1	1	3	6	10.800.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Rekomendasi MCP
59	Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Reviu	Menilai 3E rincian belanja dengan output	12 OPD Strategis	Mg-I Agt 2021	Mg-IV Agt 2021	1	1	1	3	6	14.400.000	10 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Mandatory Kemenkeu
60	Kapabilitas APIP	Monev	Menilai pemenuhan KPA	Inspektorat	Mg-IV Agt 2021	Mg-IV Agt 2021	1	1	1	3	6	-	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
61	Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting	Mendampingi dan mengevaluasi implementasi Pembangunan ZI	Dinas Dukcapil	Mg-IV Agt 2021	Mg-IV Agt 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri

Handwritten signature/initials

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Anggota Tim				HP	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PM	PT	KT	AT						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
62	Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP)	Reviu	Menilai 3 E rincian belanja dengan output	12 OPD Strategis	Mg-I Sep 2021	Mg-IV Sep 2021	1	1	1	3	6	14.400.000	10 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Mandatory Kemenkeu
63	Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat TW III	Monitoring	Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Seluruh OPD	Mg-I Spt 2021	Mg-IV Spt 2021	1	1	1	3	6	14.400.000	1 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
64	Pemerintah Desa	Audit Tujuan Tertentu	Memberikan keyakinan yang memadai atas pengelolaan keuangan Pemerintah Desa	9 Desa	Mg-I Sep 2021	Mg-III Des 2021	1	1	1	3	54	32.400.000	9 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
65	Monitoring Centre of Prevention TW III	Monitoring	Memantau tindak lanjut rekomendasi Korsupgah KPK	Rekomendasi Korsupgah	Mg-IV Spt 2021	Mg-IV Spt 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	
66	Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting	Mendampingi dan memantau implementasi Pembangunan ZI	Bag PBJ	Mg-V Spt 2021	Mg-V Spt 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
67	Penerapan manajemen Risiko	Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting	Mendampingi dan memantau implementasi Manajemen Risiko	Dinas Budpar	Mg-V Spt 2021	Mg-V Spt 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
68	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Reviu	Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK TW III 2021	OPD	Mg-I Okt 2021	Mg-III Okt 2021	1	1	1	3	6	10.800.000	5 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Mandatory Kemenkeu
69	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Audit Ketaatan	menilai ketaatan terhadap prosedur, tata cara serta peraturan perundang-undangan	Barang Milik Daerah	Mg-I Okt 2021	Mg-III Okt 2021	1	1	1	3	6	7.200.000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Rekomendasi MCP
70	UKPBJ	Audit Ketaatan	menilai ketaatan terhadap prosedur, tata cara serta peraturan perundang-undangan	IT PBJ	Mg-I Nop 2021	Mg-III Nop 2021	1	1	1	3	6	7.200.000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Rekomendasi MCP
71	Penerapan manajemen Risiko	Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting	Mendampingi dan mengevaluasi implementasi SPIP	Inspektorat	Mg-IV Okt 2021	Mg-IV Okt 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
72	Penerapan manajemen Risiko	Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting	Mendampingi dan memantau implementasi Manajemen Risiko	Dinas PMD	Mg-IV Okt 2021	Mg-IV Okt 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
73	Penyusunan Kebijakan Teknis di bidang pengawasan	Forum Group Discussion	Menyusun Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemda Kudus Tahun 2022	Inspektorat	Mg-I Jun 2021	Mg-I Jun 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 Lap	Laptop, ATK		Renbinwas 2021 Kemendagri
74	Penerapan manajemen Risiko	Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting	Mendampingi dan memantau implementasi Manajemen Risiko	Dinas Dikpora	Mg-II Nop 2021	Mg-II Nop 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
75	Penerapan manajemen Risiko	Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting	Mendampingi dan memantau implementasi Manajemen Risiko	Dinas Kesehatan	Mg-III Nop 2021	Mg-III Nop 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri

[Handwritten signature]


No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Anggota Tim				HP	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PM	PT	KT	AT						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
76	Peningkatan Kapabilitas APIP	Pengembangan Profesi (PKS)	Meningkatkan Kompetensi SDM APIP	Inspektorat	Mg IV Jan 2021	Mg IV Des 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	12 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	
77	Larwasda		Menyampaikan hasil pengawasan 2021 dan Rencana pengawasan 2022	OPD	Mg-IV Nop 2021	Mg-IV Nop 2021	1	1	1	3	6	20.000.000	1 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
78	Telaah Sejawat (Peer Review) Internal	Reviu	Menilai kepatuhan terhadap Standar Audit	Irbn I, II, III	Mg-I Des 2021	Mg-II Des 2021	1	1	1	3	18	-	3 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
79	Monitoring Centre of Prevention TW IV	Monitoring	Memantau tindak lanjut rekomendasi Korsupgah KPK	Rekomendasi Korsupgah	Mg-II Des 2021	Mg-II Des 2021	1	1	1	3	6	3.600.000	1 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	
80	Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat TW IV	Monitoring	Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Seluruh OPD	Mg-III Des 2021	Mg-IV Des 2021	1	1	1	3	6	14.400.000	1 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2021 Kemendagri
JUMLAH											982	1.192.400.000				

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama Area Pengawasan
- (3) Diisi dengan jenis pengawasan yang akan dilakukan
- (4) Diisi dengan tujuan/sasaran atas jenis pengawasan yang akan dilakukan
- (5) Diisi dengan ruang lingkup pengawasan
- (6) Diisi dengan jadwal rencana akan dilakukan pengawasan (Rencana Mulai Penugasan dan Rencana Penerbitan Laporan)
- (7) Diisi dengan anggaran waktu pelaksanaan pengawasan untuk setiap jenjang jabatan
- (8) Diisi dengan anggaran dana pelaksanaan pengawasan
- (9) Diisi dengan jumlah rencana output laporan atas hasil pengawasan
- (10) Diisi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan
- (11) Diisi dengan tingkat risiko area pengawasan
- (12) Diisi dengan keterangan lain bila dibutuhkan

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,


HARTOPO

 L 4/1